



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

P U T U S A N Nomor : 94-K/PM III-16/AD/VII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Pare-pare dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Joko Dwi Kotabanda
Pangkat/NRP	: Serda/ 21170212180995
Jabatan	: Ba Kodim 1412/Kolaka
Kesatuan	: Kodim 1412/Kolaka
Tempat dan tanggal lahir	: Ambon, 25 September 1995
JenisKelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 1412/Kolaka.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Dandenspom XIV/3 Nomor: BP-22/A-15/V/2022 tanggal 30 Mei 2022.

Memperhatikan :1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 143/HO selaku Papera Nomor: Kep/14/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/83/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/94b-K/PM.III-16/AD/XI/2022 tanggal 07 November 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/94a-K/PM.III-16/AD/XI/2022 tanggal 08 November 2022 tentang Penunjukan Hari Sidang.

5. Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor: Juktera TAP/94a/PM III-16/AD/XI/2022 tanggal 07 November 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Hal 1 dari 22 Put. No. 94-K/PM III-16/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer didepan persidangan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak pelaksanaan sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan pada hari ini tetap Terdakwa tidak hadir karena sejak semula berkas perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer III-16 Makassar Terdakwa masih belum kembali ke kesatuannya yaitu:

- 1) Hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022.
- 2) Hari Kamis tanggal 08 September 2022.
- 3) Hari Jumat tanggal 18 November 2022.

b. Bahwa Oditur Militer juga sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.

c. Bahwa berdasarkan Surat Balasan dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Dandim 1412/KIK Nomor : B/483/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 tentang Jawaban Panggilan Joko Dwi Kota Banda, Sertu NRP 21170212180995 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan dikarenakan yang bersangkutan masih Desersi dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuannya.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/83/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- 1) Pidana Pokok : 1 (satu) tahun penjara

Hal 2 dari 22 Put. No. 94-K/PM III-16/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personel Kodim 1412/Kolaka bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Mei 2022. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Dandim 1412/Klk Nomor : B/613/XI/2022 tanggal 14 November 2022 tentang Jawaban Panggilan Joko Dwi Kotabanda, Sertu NRP 21170212180995.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor: B/51/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022;

2. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor: R/168/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022;

3. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor: R/516/XI/2022 tanggal 04 November 2022 .

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Danpomdam XIV/Hsn berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-21/A-15/V/2022/Idik tanggal 6 Mei 2022 dan sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/83/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan

Hal 3 dari 22 Put. No. 94-K/PM III-16/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatnya bahwa oleh karena Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer maupun pihak Kesatuan Terdakwa tidak lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak berada lagi di kesatuannya dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya sesuai surat balasan dari kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Dandim 1412/Kik Nomor: B/613/XI/2022 tanggal 14 November 2022 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan dikarenakan yang bersangkutan masih Desersi dan hingga sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Maka oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara in absentia (tanpa hadirnya Terdakwa).

Menimbang : Bahwa guna terpenuhinya ketentuan dalam hukum acara mengenai perhitungan waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, maka Majelis memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan secara inabsensia atau tidak dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mendasari ketentuan itu, terutama jika Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwasanya dihadapkan dengan ketentuan dalam

Hal 4 dari 22 Put. No. 94-K/PM III-16/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 maka sejatinya seorang Hakim bukanlah hanya sebatas sebagai mulut atau corong dari Undang-undang belaka begitu pula dengan para aparat penegak hukum lainnya seyogianya harus menjadi mulut kebenaran dan keadilan dengan memperhatikan bahwa setiap perkara memiliki sebab-sebab, karakter dan wujud yang berbeda-beda, dimana hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar untuk mempertahankan hukum semata, bahwa hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa bertugas yang segera menginginkan adanya kepastian hukum terhadap penyelesaian perkara anggotanya yang berlarut-larut karena melakukan tindak pidana desersi dan tidak kembali hingga dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ditegaskan pula bahwasannya pengadilan militer adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum dalam rangka penyelesaian berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya persidangan perkara Terdakwa secara in absensia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan dimana hal ini sekaligus sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi di lingkungan TNI sebagaimana sesuai azas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa meskipun meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Relas panggilan sidang dari Dandim 1412/Klk Nomor: B/613/XI/2022 tanggal 14 November 2022 tentang Jawaban Panggilan Sertu Joko Dwi Kotabanda NRP 21170212180995.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia). Dalam hal ini Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Sertu Joko Dwi Kotabanda NRP 21170212180995 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia) dikarenakan Terdakwa sejak semula melarikan diri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/83/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Hal 5 dari 22 Put. No. 94-K/PM III-16/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan Maret tahun 2000 dua puluh dua sampai dengan tanggal enam bulan Mei tahun 2000 dua puluh dua, setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh dua di Makodim 1412/Kolaka, setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketikhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ba Kodim 1412/Kolaka, Kesatuan Kodim 1412/Kolaka dengan pangkat Serda NRP 21170212180995.

b. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2022 berdasarkan surat perintah Danrem 143/Ho Nomor : Sprin/112/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang lainnya Sertu Fahmi Muhtar (Saksi-2), Serda Eki Tri Mantong, Serda Joko Dwi Kotabanda, Praka Haslan, Praka Irfan, Pratu Ardian Pratama dan Prada Andi Mansur Muhammad, melaksanakan Korps raport pelepasan alih tugas dari Korem 143/Ho ke Kodim 1412/Kolaka, kemudian Kasipers Kasrem a.n Kolonel Caj Denny Satya Nugraha mengambil alih pelepasan tugas tersebut dan memerintahkan seluruh personel yang alih tugas segera melapor ke kesatuan barunya paling lambat pada tanggal 28 Februari 2022.

c. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2022 Serma Ramlin (Saksi-3) menerima 5 (lima) orang Personel baru masuk dinas di Kodim 1412/Kolaka a.n Serda Eki Tri Mantong, Praka Haslan, Praka Irfan, Pratu Ardian Pratama dan Prada Andi Mashur untuk melaksanakan Korp raport berdasarkan surat perintah Danrem 143/Ho Nomor : Sprin/112/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 dan kemudian Saksi-3 menanyakan keberadaan 2 (dua) orang lagi a.n Saksi-2 dan Terdakwa kemudian di jawab oleh Serda Eki Tri Mantong "kalau Sertu Fahmi Muhtar (Saksi-2) masih di rawat di rumah sakit Korem sedangkan Terdakwa tidak tahu" lalu Saksi-3 menyampaikan kepada personel yang baru agar menghubungi Terdakwa dan pada saat di hubungi lewat telepon Hp milik Terdakwa sudah tidak aktif.

d. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Kota Kendari dan di Kolaka bahkan Kasipers Korem 143/Ho telah memerintahkan pejabat Pers Kodim 1412/Kolaka untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai sekarang ini Terdakwa belum ditemukan.

Hal 6 dari 22 Put. No. 94-K/PM III-16/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1412/Kolaka atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1412/Kolaka atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan kerjanya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris satuan.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1412/Kolaka atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022 atau selama 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1412/Kolaka atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Frans Dodi Alexander
Pangkat/NRP : Serka/ 21110137570190
Jabatan : Batiminpers Sipers
Kesatuan : Korem 143/Ho
Tempat tanggal lahir : Kendari, 24 Januari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 7 dari 22 Put. No. 94-K/PM III-16/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Katolik
Tempat tinggal : Asrama Korem 143/Ho.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2022 pada saat Terdakwa Korps Rapor pelepasan dinas dari Makorem 143/Ho ke Kodim 1412/Kolaka dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2022 sesuai dengan surat perintah Danrem 143/Ho Nomor : Sprin/112/II/2022 tanggal 23 Februari tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam Jabatan/kesatuan Bintara dan Tamtama Angkatan Darat Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang lainnya mendapatkan surat perintah ke Kodim 1412/Kolaka diantaranya Sertu Fahmi Muhtar(Saksi-2), Serda Eki Tri Mantong, Serda Joko Dwi Kotabanda, Praka Haslan, Praka Irfan, Pratu Ardian Pratama dan Prada Andi Mashur Muhammad.

3. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2022 pada saat Terdakwa selesai melaksanakan pembersihan rumah jabatan Kasipers Kasrem 143/Ho a.n Kolonel Caj Denny Satya Nugraha kemudian Terdakwa bersama anggota lainnya di ambil alih oleh Kasipers Kasrem 143/Ho untuk dilepas ke kesatuan barunya.

4. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2022 Pasipers Kodim 1412/Kolaka a.n Kapten Inf Rustan telah melaporkan Personel baru yang telah tiba di Kodim 1412/Kolaka, namun Terdakwa tidak datang ke Kodim 1412/Kolaka kemudian Pasipers Kodim 1412/Kolaka melaporkan kejadian tersebut ke Pers Korem 143/Ho.

5. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Kota Kendari dan di Kolaka bahkan Kasipers Korem 143/Ho telah memerintahkan pejabat Pers Kodim 1412/Kolaka untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai sekarang ini Terdakwa belum ditemukan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1412/Kolaka atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan kerjanya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris satuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1412/Kolaka atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan

Hal 8 dari 22 Put. No. 94-K/PM III-16/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Saksi- 2:

Nama lengkap : Fahmi Muhtar
Pangkat/NRP : Sertu/ 21160146020597
Jabatan : Ba Unit Intel Kodim 1412/Kolaka
Kesatuan : Kodim 1412/Kolaka
Tempat tanggal lahir : Sinjai, 27 Mei 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1412/Kolaka.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Yonif 725/Wrg pada saat Saksi dan Terdakwa berdinis di Yonif 725/Wrg dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2022 Saksi melaksanakan Korps raport pelepasan alih tugas dari Korem 143/Ho ke Kodim 1412/Kolaka bersama 6 (enam) orang diantaranya Serda Eki Tri Mantong, Serda Joko Dwi Kotabanda, Praka Haslan, Praka Irfan, Pratu Ardian Pratama dan Prada Andi Mansur Muhammad, kemudian Kasipers Kasrem a.n Kolonel Caj Denny Satya Nugraha mengambil alih pelepasan tugas tersebut dan memerintahkan seluruh personel yang alih tugas segera melapor ke kesatuan barunya dan paling lambat pada tanggal 28 Februari 2022.
3. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2022 Saksi melaksanakan Korps raport di Kodim 1412/Kolaka sedangkan 5 (lima) orang lainnya telah melaksanakan Korps raport pada tanggal 1 Maret 2022 diantaranya Serda Eki Tri Mantong, Praka Haslan, Praka Irfan, Pratu Ardian Pratama dan Prada Andi Mashur Muhammad sedangkan Terdakwa belum melaksanakan Korps raport sampai sekarang ini.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1412/Kolaka atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Kota Kendari dan di Kolaka bahkan Kasipers Korem 143/Ho telah memerintahkan pejabat Pers Kodim 1412/Kolaka untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai sekarang ini Terdakwa belum ditemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1412/Kolaka atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan kerjanya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris satuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1412/Kolaka atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Saksi- 3:

Nama lengkap : Ramlin
Pangkat/NRP : Serma/3920845620372
Jabatan : Bati Pers Kodim 1412/Kolaka
Kesatuan : Kodim 1412/Kolaka
Tempat tanggal lahir : Kolaka, 13 Maret 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Poros Kolaka Pomalaa Kel. Wundulako Kab. Kolaka.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa masuk Dinas ke Kodim 1412/Kolaka bersama 6 (enam) orang lainnya diantaranya Sertu Fahmi Muhtar (Saksi-2), Serda Eki Tri Mantong, Praka Haslan, Praka Irfan, Pratu Ardian Pratama dan Prada Andi Mashur Muhammad dengan dasar surat perintah Danrem 143/Ho Nomor : Sprin/112/II/2022 tanggal 23 Februari 2022.

3. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2022 5 (lima) orang Personel yang baru masuk dinas di Kodim 1412/Kolaka a.n Serda Eki Tri Mantong, Praka Haslan, Praka Irfan, Pratu Ardian Pratama dan Prada Andi Mashur untuk melaksanakan Korp raport berdasarkan surat perintah Danrem 143/Ho Nomor : Sprin/112/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 dan Saksi menerima Korps raport tersebut kemudian Saksi menanyakan mana 2 (dua) orang lagi a.n Saksi-2 dan Terdakwa kemudian di jawab oleh Serda Eki Tri Mantong "kalau Sertu Fahmi Muhtar (Saksi-2) masih di rawat di rumah sakit Korem sedangkan Terdakwa tidak tahu" lalu Saksi menyampaikan kepada personel yang baru agar menghubungi Terdakwa dan pada saat di hubungi lewat telepon Hp milik Terdakwa sudah tidak aktif.

Hal 10 dari 22 Put. No. 94-K/PM III-16/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2022 Saksi-2 datang untuk melaksanakan Korps raport di Kodim 1412/Kolaka dan Saksi menerima Korps raportnya kemudian Saksi menyampaikan agar Saksi-2 melengkapi dosirnya dan menyesuaikan kegiatan di Makodim 1412/Kolaka sedangkan Terdakwa belum datang di Kodim 1412/Kolaka sampai sekarang ini.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1412/Kolaka atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan kerjanya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris satuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1412/Kolaka atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Saksi- 4:

Nama lengkap : Sawaluddin
Pangkat/NRP : Koptu/ 31050908840685
Jabatan : Dancuk 2 Ru I Ton SMB Denma
Korem 143/HO
Kesatuan : Korem 143/HO
Tempat tanggal lahir : Nambo, 22 Juni 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Korem 143/HO.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pindah Dinas ke Kodim 1412/Kolaka bersama 6 (enam) orang lainnya diantaranya Sertu Fahmi Muhtar (Saksi-2), Serda Eki Tri Mantong, Praka Haslan, Praka Irfan, Pratu Ardian Pratama dan Prada Andi Mashur Muhammad dengan dasar surat perintah Danrem 143/Ho Nomor : Sprin/112/II/2022 tanggal 23 Februari 2022.

3. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 24 Februari 2022 di Makorem 143/Ho Terdakwa bersama beberapa personel lainnya melaksanakan Korps raport pelepasan alih tugas dari Korem 143/Ho ke Kodim 1412/Kolaka dan di ambil alih oleh Kasipers Kasrem 143/Ho dan memerintahkan agar seluruh personel yang pindah tugas agar segera laporan ke kesatuan barunya namun sampai sekarang ini Terdakwa belum laporan ke Kodim 1412/Kolaka.

Hal 11 dari 22 Put. No. 94-K/PM III-16/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1412/Kolaka atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1412/Kolaka atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan kerjanya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris satuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1412/Kolaka atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personel Kodim 1412/Kolaka bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Mei 2022. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan sekarang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ba Kodim 1412/Kolaka, Kesatuan Kodim 1412/Kolaka dengan pangkat Serda NRP 21170212180995.
2. Bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2022 berdasarkan surat perintah Danrem 143/Ho Nomor : Sprin/112/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang lainnya Sertu Fahmi Muhtar (Saksi-2), Serda Eki Tri Mantong, Serda Joko Dwi Kotabanda, Praka Haslan, Praka Irfan, Pratu Ardian Pratama dan Prada Andi Mansur Muhammad, melaksanakan Korps raport pelepasan alih tugas dari Korem 143/Ho ke Kodim 1412/Kolaka, kemudian Kasipers Kasrem a.n Kolonel Caj Denny Satya Nugraha mengambil alih pelepasan tugas tersebut dan memerintahkan seluruh personel yang alih tugas segera melapor ke kesatuan barunya paling lambat pada tanggal 28 Februari 2022.
3. Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2022 Serma Ramlin (Saksi-3) menerima 5 (lima) orang Personel baru masuk dinas di Kodim 1412/Kolaka a.n Serda Eki Tri Mantong, Praka Haslan, Praka Irfan, Pratu Ardian Pratama dan Prada Andi Mashur untuk melaksanakan Korp raport berdasarkan surat perintah Danrem 143/Ho Nomor : Sprin/112/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 dan kemudian Saksi-3 menanyakan keberadaan 2 (dua) orang lagi a.n Saksi-2 dan Terdakwa kemudian di jawab oleh Serda Eki Tri Mantong "kalau Sertu Fahmi Muhtar (Saksi-2) masih di rawat di rumah sakit Korem sedangkan Terdakwa tidak tahu" lalu Saksi-3 menyampaikan kepada personel yang baru agar menghubungi Terdakwa dan pada saat di hubungi lewat telepon Hp milik Terdakwa sudah tidak aktif.
4. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Kota Kendari dan di Kolaka bahkan Kasipers Korem 143/Ho telah memerintahkan pejabat Pers Kodim 1412/Kolaka untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai sekarang ini Terdakwa belum ditemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1412/Kolaka atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1412/Kolaka atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan kerjanya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris satuan.

Hal 13 dari 22 Put. No. 94-K/PM III-16/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1412/Kolaka atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022 atau selama 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1412/Kolaka atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu	: Militer
Unsur kedua	: Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
Unsur ketiga	: Dalam waktu damai
Unsur keempat	: Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Militer”.

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani “Miles” yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk

Hal 14 dari 22 Put. No. 94-K/PM III-16/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya : Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan tindak pidana masih berstatus dinas aktif dengan Pangkat, NRP Serda, NRP 21170212180995, jabatan Ba Kodim 1412/Kolaka Kesatuan : Kodim 1412/Kolaka.
2. Bahwa benar sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI AD.
3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat NRP Serda, NRP 21170212180995 Kesatuan sama dengan para Saksi di Kodim 1412/Kolaka dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana

Hal 15 dari 22 Put. No. 94-K/PM III-16/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaiannya dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 02 Maret 2022.
2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
3. Bahwa benar pada 22 Maret 2022 Kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Dandenspom XIV/3 berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-21/A-15/V/2022/idik tanggal 06 Mei 2022 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 Mei 2022 atau selama 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut atau setidak-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Hal 16 dari 22 Put. No. 94-K/PM III-16/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa tidak memenuhi aturan yang berlaku bagi militer mengenai prosedur perijinan dimana hal tersebut sepatutnya telah diketahui oleh seluruh prajurit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga: "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa yaitu Lanud Sultan Hasanuddin sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 Mei 2022, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa yaitu Lanud Sultan Hasanuddin sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 Mei 2022, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam masa damai.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 17 dari 22 Put. No. 94-K/PM III-16/AD/VII/2022



1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 Mei 2022 atau selama 66 (Enam puluh enam) hari.

2. Bahwa benar waktu selama 66 (Enam puluh enam) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 66 (Enam puluh enam) hari, adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

3. Bahwa benar absensi Terdakwa di kesatuannya yang menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan sekarang tidak menandatangani lembar absensi yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut, sebagaimana bukti surat 66 (Enam puluh enam) hari.

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personel Kodim 1412/Kolaka bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Mei 2022. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan

Hal 18 dari 22 Put. No. 94-K/PM III-16/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI serta mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat militansi dan dedikasi serta mental yang rendah.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal 19 dari 22 Put. No. 94-K/PM III-16/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

Bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat meringankan dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga;
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer;
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya; dan
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya. Dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya dihubungkan dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan prajurit menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa telah nyata tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak kembali ke kesatuan, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk tetap berdinis dalam TNI AD. Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinis di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika dipertahankan hanya akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan. Di samping itu dikawatirkan keberadaan Terdakwa dalam status sebagai prajurit TNI akan sangat mencemarkan nama baik dan akan mengganggu serta menggoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI. Dengan demikian Terdakwa dinilai tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 20 dari 22 Put. No. 94-K/PM III-16/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri sebelum masa untuk melaksanakan pidana daluwarsa Oditur Militer dapat melaksanakan eksekusi pelaksanaan pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personel Kodim 1412/Kolaka bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Mei 2022. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Seluruhnya berisikan keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan sekarang. Majelis berpendapat bahwa surat-surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara. Oleh karena itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : JOKO DWI KOTABANDA, Serda NRP 21170212180995, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun penjara.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personel Kodim 1412/Kolaka bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Mei 2022. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Hal 21 dari 22 Put. No. 94-K/PM III-16/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 18 November 2022 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H.,M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524416 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H.,M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Christian Daniel Kilis, S.H. Letkol Laut (H) NRP 13026/P Panitera Pengganti, Nurman Pelda NRP 21000098320879 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Desman Wijaya, S.H.,M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524416

Johanes Sudarso Taruk, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti,

Pelda Nurman
Pelda NRP 21000098320879

Hal 22 dari 22 Put. No. 94-K/PM III-16/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)